

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, KUALITAS AUDIT DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TRANSPARANSI INFORMASI**  
(Studi Empiris pada 100 Perusahaan Publik Terbesar di Indonesia)

**RIA NELLY SARI, RITA ANUGERAH & RHIA DWININGSIH**

**Fakultas Ekonomi Universitas Riau**

**ABSTRACT**

*This paper aims to examine the effect of ownership structure, audit quality and company size on transparency of information. Seventy-three large public firms from 100 largest companies rated by SWA 2008 were selected as the sample. Transparency is indexed by the extent to which companies disclose the voluntary information in their annual report for the year 2005-2007. A panel data set of 219 firm year observations is analyzed. Results demonstrate that company size do effect the transparency of information. From three types of ownership structure only foreign ownership has significant effect on transparency of information. The discussion and implications of the findings and suggestion for future research are discussed.*

*Keywords: institutional ownership, managerial ownership, foreign ownership, audit quality, company size, transparency of information.*

**LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Transparansi dan pengungkapan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari tata kelola perusahaan. Tingkat transparansi yang tinggi dan pengungkapan yang memadai akan mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan stakeholder. Transparansi informasi dipandang sebagai salah satu aspek dari infrastruktur yang penting agar mendapatkan modal dari luar (*global capital*), terutama bagi *emerging market economies* (Chowdhury dan Mavrotas 2006). Bukti empiris menunjukkan bahwa investor asing menolak untuk melakukan investasi di negara sedang berkembang karena lemahnya praktik tata kelola perusahaan dinegara-negara ini (Mckinsey and Company, 2001; Gibson, 2003). Investor asing pada umumnya lebih menyukai untuk berinvestasi pada suatu perusahaan dimana mereka memperoleh informasi yang lengkap mengenai perusahaan dan meyakini bahwa investasi yang dilakukan diproteksi dengan baik (Merton, 1987).

Transparansi mewajibkan adanya suatu yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan. Pengungkapan informasi mengenai perusahaan tercermin dalam penerbitan laporan tahunan. Saat ini laporan tahunan tidak hanya berfungsi sebagai pertanggungjawaban manajemen dalam RUPS tetapi laporan tahunan perusahaan juga dapat dijadikan sebagai media komunikasi yang efektif kepada semua pihak tentang kinerja dan prospek perusahaan kedepan. Transparansi informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan menjadi salah satu media pembuktian perusahaan kepada publik mengenai praktik tata kelola perusahaan tersebut.

Di Indonesia, absennya praktik tata kelola perusahaan yang baik menjadi penyebab buruknya kinerja ekonomi yang berujung pada krisis finansial yang dimulai pada akhir tahun 1997 (Prasetyantoko, 2008). Dalam kerangka teoritis,

buruknya kinerja tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu persoalan agensi dan persoalan transparansi informasi. Persoalan transparansi informasi akan terselesaikan dengan sendirinya apabila persoalan agensi dapat diatasi dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Hasil penelitian di Malaysia menemukan bukti bahwa lemahnya praktik tata kelola perusahaan berdampak pada rendahnya tingkat transparansi dan lemahnya hubungan dengan investor (Mohamad, 2002). Padahal dengan meningkatkan tingkat transparansi, memperbaiki tata kelola perusahaan dan hubungan yang baik dengan investor adalah tiga faktor yang dapat meningkatkan *capital inflow* ke suatu negara (The Edge, 8 Juni 1998). Oleh karena itu untuk meningkatkan hubungan dengan para investor, perusahaan diharuskan lebih transparan mengungkapkan informasi terutama mengenai informasi yang bersifat sukarela dengan mempertahankan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga dengan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik perusahaan cenderung lebih transparan dalam mengungkapkan informasi ke pada publik (Huafang dan Jianguo, 2007; Che Haat dkk., 2008).

Beberapa penelitian terdahulu, terutama yang berkaitan dengan pengungkapan sukarela telah menemukan bukti bahwa luas tidaknya pengungkapan informasi dari suatu perusahaan ditentukan oleh berbagai faktor. Diantara faktor tersebut adalah struktur kepemilikan, kualitas audit dan ukuran perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dijalankan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur kepemilikan, kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap tingkat transparansi informasi pada perusahaan 100 perusahaan publik terbesar di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman kita tentang faktor-faktor yang menyebabkan bervariasinya tingkat transparansi informasi.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Transparansi Informasi melalui Pengungkapan Sukarela**

Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui transparansi dalam pengungkapan informasi yang lebih bersifat sukarela. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan (Meek dkk, 1995). Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lain yang relevan untuk pembuatan keputusan bagi para pemakai laporan tahunan. Pengungkapan informasi sukarela secara lebih luas bertujuan untuk membantu investor memahami strategi bisnis manajemen, sehingga dapat mengambil keputusan untuk melakukan atau melanjutkan investasi (Healy dan Palepu, 1993).

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **a. Kepemilikan Manajerial dan Transparansi Informasi**

Kepemilikan manajerial ditandai dengan adanya kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen yang ikut berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Sebagai pihak yang tidak mengikuti operasi perusahaan sehari-hari, pemilik menginginkan pengungkapan informasi yang seluas-luasnya. Di pihak lain, ada dorongan bagi manajemen untuk selektif dalam melakukan pengungkapan informasi karena pengungkapan informasi mengandung biaya. Manajemen hanya akan mengungkapkan informasi jika manfaat yang diperoleh dari pengungkapan melebihi biaya pengungkapan informasi tersebut (Marwata, 2001). Pada kasus seperti ini perusahaan yang sahamnya juga dimiliki oleh pihak manajerial cenderung tidak transparan dalam mengungkapkan informasi (Huafang dan Jianguo, 2007).

Dengan biaya pengungkapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh akan mengurangi laba sebagai tolak ukur yang digunakan dalam penilaian kinerja dan bonus bagi pihak manajemen, terlebih posisi pihak manajemen sendiri yang juga memiliki saham tidak mempunyai unsur keterikatan lebih kepada pihak lain untuk mengungkapkan informasi, membuat pihak manajemen enggan melakukan transparansi dalam mengungkapkan informasi kepada pihak luar.

Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis penelitian berikut diajukan:

H<sub>1</sub>: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap transparansi Informasi

#### **b. Kepemilikan Institusional dan Transparansi Informasi**

Pemilik institusional dinilai memiliki peranan yang penting dalam sebuah perusahaan. Disamping sebagai salah satu sumber dana perusahaan, investor institusional ikut aktif dalam mengawasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan perusahaan. Mereka juga menjadi salah satu sumber informasi perusahaan. Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Menurut Bushee (1998) dalam Boediono (2005) kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Dalam hal ini pihak manajemen diwajibkan untuk melakukan pengungkapan informasi seluas-luasnya untuk dapat mempertahankan Investor institusional.

Berdasarkan argumen di atas hipotesis penelitian berikut diajukan:

H<sub>2</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap transparansi Informasi

#### **c. Kepemilikan Asing dan Transparansi Informasi**

Perusahaan multinasional atau dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi berasal dari para *stakeholder*-nya dimana secara tipikal berdasarkan atas *home market* (pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang. Pengungkapan merupakan salah satu media yang dipilih untuk tetap menjaga kredibilitas dengan pemaparan informasi secara menyeluruh mengenai kondisi perusahaan.

Hasil penelitian Huafang dan Jianguo (2007) yang menunjukkan perusahaan yang memiliki saham asing di atas berhubungan positif dengan luas peningkatan sukarela atau dengan kata lain semakin banyak saham yang dimiliki oleh pihak asing, semakin luas tingkat transparansi informasi.

Berdasarkan penjelasan di atas berikut dirumuskan hipotesis penelitian sbb:

H<sub>3</sub>: Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap transparansi informasi

#### **d. Ukuran Perusahaan dan Transparansi Informasi**

Secara umum, perusahaan besar akan lebih transparan dalam mengungkapkan informasi dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil. Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jensen & Meckling, 1976). Perusahaan besar mungkin akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Penjelasan lain yang mungkin adalah perusahaan besar menghadapi biaya politis yang lebih besar dibandingkan daripada

perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan besar merupakan entitas yang disorot oleh pasar maupun public secara umum. Lebih transparan dalam pengungkapan informasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan menghindari risiko dipandang sebagai “*lemon*” oleh pasar. Perusahaan besar pada umumnya mempunyai beragam produk dan beroperasi di berbagai wilayah termasuk luar negeri. Sehingga perusahaan besar lebih mungkin merekrut karyawan dengan ketrampilan tinggi yang diperlukan untuk menerapkan sistem pelaporan manajemen yang canggih sehingga dapat mengungkapkan informasi yang lebih luas. Sebagian besar pemegang saham perusahaan juga memerlukan lebih banyak pengungkapan karena tuntutan para pemegang saham dan analis pasar. Atau dapat dikatakan perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang berukuran lebih kecil. Alasan lainnya adalah bahwa perusahaan besar mempunyai biaya informasi yang lebih rendah berkaitan dengan transparansi informasi yang diungkapkan. Lebih banyak pemegang saham juga memerlukan transparansi informasi yang lebih karena tuntutan pemegang saham dan analis pasar modal.

Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap transparansi informasi

#### **e. Kualitas Audit dan Transparansi Informasi**

Audit yang dilakukan oleh auditor eksternal merupakan unsur yang penting didalam efisiensi pasar modal. Hal ini dikarenakan audit yang telah dilakukan dapat meningkatkan kredibilitas dari informasi keuangan, yang secara langsung mendukung praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik melalui transparansi pelaporan keuangan (Francis dkk, 2003, Sloan 2001; Che Haat dkk., 2008). Peran auditor eksternal disini yakni memberikan penilaian secara independen dan profesional atas keandalan dan kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Auditor eksternal dapat menjadi mekanisme pengendalian terhadap manajemen agar manajemen menyajikan informasi keuangan secara andal, dan terbebas dari praktik kecurangan akuntansi. Peran ini dapat dicapai jika auditor eksternal memberikan jasa audit yang berkualitas.

Berdasarkan penelitian Teoh dan Wong (1993) ditunjukkan pasar merespon secara berbeda terhadap kualitas auditor, yang diprosikan dengan auditor big 5 dan non big 5. Artinya semakin berkualitas auditor maka semakin tinggi kredibilitas angka akuntansi yang dilaporkan, dengan demikian semakin besar tingkat pengungkapan laporan keuangan. Pengaruh tingginya kredibilitas angka akuntansi yang dilaporkan oleh KAP yang dikategorikan KAP `besar` mempunyai pengaruh yang lebih untuk mempengaruhi perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huafang dan Jianguo (2007).

Dari diskusi tersebut di atas penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap transparansi informasi

## METODE PENELITIAN

### Sampel dan Data

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 perusahaan publik yang menduduki peringkat 1-100 versi SWA "The Largest 100 Indonesia's Public Companies 2008". Perusahaan-perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tiga periode secara berturut-turut yaitu periode 2005 – 2007 dan bukan perusahaan yang bergerak dalam sektor keuangan serta mempunyai data yang lengkap sesuai kebutuhan penelitian. Dengan demikian penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 73 perusahaan dengan panel data sebanyak 219 perusahaan-tahun (*pooled data* untuk tahun 2005-2007).

### Variabel Dependen

Variabel dependen penelitian ini adalah transparansi informasi. Dalam penelitian ini transparansi informasi didefinisikan sebagai pengungkapan secara sukarela oleh manajemen atas berbagai macam informasi diluar informasi yang disyaratkan oleh peraturan dan ketentuan tertentu yang berlaku bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti mencoba menilai sejauhmana perusahaan mengungkapkan enam kelompok informasi yaitu informasi umum perusahaan, informasi mengenai dewan komisaris dan direksi, profil perusahaan, analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja, *Good Corporate Governance* dan informasi lain-lain. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penghitungan dengan melakukan pengindexan dengan metode scoring atas item-item informasi dari enam kelompok informasi seperti disebutkan di atas dengan mengadopsi kriteria penilaian Annual Report Award (ARA) 2008. Berdasarkan enam kelompok informasi tersebut di atas terdapat 156 poin checklist untuk mengukur index transparansi informasi.

### Variabel Independen

**Kepemilikan Manajerial.** Kepemilikan manajerial ditandai dengan adanya kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen dan dewan komisaris yang ikut berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial didasarkan pada persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris.

**Kepemilikan Institusional.** Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan oleh institusi keuangan ataupun non keuangan dimana umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Tingkat kepemilikan saham institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusi yang dinyatakan dalam persentase.

**Kepemilikan Asing.** Kepemilikan asing didefinisikan sebagai kepemilikan saham perusahaan oleh pihak yang tidak terdaftar sebagai warga negara ataupun secara hukum diakui mempunyai hak untuk berusaha dinegara tersebut.

**Ukuran perusahaan.** Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan log natural dari total aktiva pada akhir periode.

**Kualitas Audit.** Kualitas audit diproxikan dengan besar kecilnya kantor akuntan publik (KAP) yang memeriksa perusahaan sampel. KAP besar di anggap lebih baik

kualitas auditnya sehingga cenderung akan lebih banyak melakukan pengungkapan atas informasi perusahaan atau lebih transparan. Dalam penelitian ini KAP dinyatakan sebagai KAP besar apabila KAP tersebut termasuk dalam KAP kategori *big 4* (Ernst & Young, Price Waterhouse and Coopers, KPMG dan Deloitte) dan KAP kecil selain KAP kategori *big 4*. Variabel kualitas audit diukur dengan *dummy variable*; 1 untuk KAP besar dan 0 untuk KAP kecil.

### **Metode Analisis Data**

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diuji dengan teknik regresi data panel (*panel data regression techniques*). Pemilihan teknik regresi data panel dilakukan karena penelitian ini menggunakan data silang dan data runtut waktu. Analisis regresi data panel dilakukan dengan pendekatan efek random (Random Effects) dengan menggunakan program Eviews 3. Efek random digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian (Winarno, 2009). Pemilihan pendekatan efek random sesuai dengan syarat penggunaan efek random yaitu objek data silang lebih besar besar jumlahnya daripada banyaknya koefisien (Winarno, 2009).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Statistik Deskriptif**

Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif variabel penelitian. Total aktiva tertinggi yang dimiliki oleh perusahaan sampel adalah 688,3Triliun, terendah 143 Milyar dengan rata-rata total aset sebesar 11 Triliun. Index transparansi informasi terendah adalah sebesar 23,7% dan indeks tertinggi sebesar 84,6%. Rata-rata indeks transparansi informasi perusahaan publik dalam rentang waktu tahun 2005-2007 adalah sebesar 50,87%. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara umum perusahaan publik di Indonesia sudah bersedia untuk mengungkapkan informasi kepada publik walaupun informasi tersebut tidak diwajibkan oleh Bapepam. Hal ini sesuai dengan teori pensignalan yang menyatakan bahwa manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya bila informasi tersebut merupakan berita baik. Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan.

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif (n=219)**

<b>Variabel</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Maksimum</b>	<b>Minimum</b>	<b>Deviasi Standar</b>
Total Aktiva	11.057.837.888.910	688.375.422.986.000	143.432.000.000	4,77360E+13
Kepemilikan Manajerial	0,32274	9,62	0,000	1,0467
Kepemilikan Institusional	6,0006	99,770	3,140	21,1450
Kepemilikan Asing				
Indeks Transparansi Inforormasi	0,5087	0,846	0,237	0,1517

### Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi dengan pendekatan efek random dengan bantuan program Eviews 3. Hasil pengujian (Tabel 2) menunjukkan bahwa dari kelima variabel independen hanya variabel kepemilikan asing ( $\beta = 0.038734$ ,  $t=2,059060$ ,  $p<0,05$ ) dan ukuran perusahaan ( $\beta = 0.066433$ ,  $t= 6,193286$ ,  $p<0,01$ ) yang secara signifikan dapat mempengaruhi transparansi informasi. Dengan hasil analisis ini, maka tiga variabel independen lainnya yaitu kepemilikan manajerial (H1), kepemilikan institusi (H2) dan kualitas audit (H5) tidak dapat dibuktikan sebagai variabel yang mempengaruhi tingkat transparansi informasi bagi perusahaan sampel ( $t < 1,645$ ; one tail test).

**Tabel 2**  
**Hasil Pengujian Statistik**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1,439662	0,309709	-4,648440	0,0000
Kepemilikan Manajerial	0,001998	0,004215	0,473864	0,6361
Kepemilikan Institusional	6,82E-05	0,000356	0,191522	0,8483
Kepemilikan Asing	0,038734	0,018811	2,059060	0,0407
Ukuran Perusahaan	0,066433	0,010727	6,193286	0,0000
Kualitas Audit	-0,007019	0,023294	-0,301308	0,7635
R <sup>2</sup>	0,821263			
Adj. R <sup>2</sup>	0,817068			
Durbin-Watson Stat.	1,835520			
N	219			

### Pembahasan, Keterbatasan Penelitian dan Saran

Penelitian ini tidak berhasil membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat transparansi informasi. Penolakan hipotesis ini sejalan dengan hasil penelitian Huafang dan Yuan (2007) yang juga tidak dapat membuktikan adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap luas pengungkapan sukarela. Peneluran kembali pada sampel data menunjukkan rendahnya persentase kepemilikan manajerial bagi perusahaan sampel dengan rata-rata kepemilikan sebesar 3,2% dan tertinggi sebesar 9,62% (lihat tabel 1). Data ini menunjukkan bahwa kepemilikan anggota dewan direksi dan dewan komisaris atas saham perusahaan adalah sangat terbatas. Bahkan dari 219 data sampel, 137 (62,56%) data menunjukkan nilai kepemilikan manajerial 0%, yang berarti tidak ada anggota dewan komisaris dan dewan direksi yang memiliki saham perusahaan tempat mereka bekerja. Karena persentase kepemilikan saham sangat rendah, manajemen yang juga sebagai pemegang saham perusahaan tidak mampu mempengaruhi kebijakan perusahaan termasuk kebijakan dalam melakukan transparansi informasi.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi. Penolakan hipotesis ini sejalan dengan penelitian Machmud (2008) yang menemukan bahwa institusi yang memiliki saham perusahaan belum mempertimbangkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi, sehingga para investor institusi ini juga cenderung tidak menekan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sukarela.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi. Penerimaan hipotesis ini sejalan dengan penelitian Che Haat dkk. (2008) yang menemukan adanya hubungan antara kepemilikan asing dengan transparansi informasi. Dengan dimilikinya saham perusahaan oleh pihak asing maka ada tuntutan kepada manajemen untuk menunjukkan kredibilitas perusahaan. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Chee Haat dkk. (2008) yang menyatakan bahwa investor asing mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam menentukan pilihan untuk berinvestasi. Oleh karena itu manajemen akan berusaha mengungkapkan lebih banyak informasi, menjadi lebih transparan, agar dinilai kredibel dan bertanggung jawab dalam menjalankan operasionalisasi perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis ke empat menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi. Penerimaan hipotesis ini sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu (Che Haat, 2008; Fitriany, 2001; Gunawan, 2000; Hadi and Sabeni, 2002; Hossain dkk., 1994). Ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang dapat menjelaskan variasi pengungkapan atau transparansi informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Menurut Lang dan Lundholm (1993) perusahaan-perusahaan dengan skala besar selalu mendapat tekanan dari analisis keuangan untuk menyediakan berbagai informasi oleh karena itu perusahaan dengan ukuran besar akan cenderung lebih transparan dibanding dengan perusahaan berukuran kecil. Disamping itu perusahaan berukuran besar akan berusaha mengurangi biaya politik dengan mengungkapkan berbagai informasi sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005).

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel kualitas audit yang diproxikan dengan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi. Penolakan hipotesis ini bertentangan dengan hasil penelitian Che Haat dkk. (2008) yang menemukan adanya hubungan antara kualitas audit dengan transparansi informasi. Walau bagaimanapun, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nugrahadi (2008). Di Indonesia walaupun perusahaan telah diaudit oleh KAP besar yang tentunya menghasilkan kualitas audit yang baik, tetapi KAP besar tidak dapat mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat *voluntary*. Ruang lingkup Auditor dalam hal ini hanya bertindak sebagai advisor dan memberikan opini atas penyajian laporan keuangan yang bersifat pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*).

Dalam penelitian ini pengungkapan sukarela dijadikan sebagai dasar ukuran indeks transparansi informasi. Indeks pengungkapan diperoleh dari informasi membaca laporan tahunan dan data lain yang terkait dalam item yang diungkapkan oleh perusahaan, sehingga mungkin dipengaruhi oleh tingkat kejelian dan subjektivitas peneliti. Disamping itu, item informasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanpa pembobotan dimana masing-masing diberlakukan secara sama, sehingga tidak memperhitungkan tingkat bobot masing-masing item pengungkapan. Penelitian yang akan datang dapat menggunakan metode pembobotan terhadap informasi yang diungkapkan. Penelitian ini hanya mempertimbangkan faktor struktur kepemilikan, kualitas audit dan ukuran perusahaan sebagai variabel yang menyebabkan bervariasinya tingkat transparansi informasi rantar perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu menemukan beberapa variabel lain yang juga dapat mempengaruhi tingkat transparansi seperti *internal governance mechanisms* dan *debt financing* (Che Haat dkk., 2008), pengaruh politik (Saleh dan Dunmore, 2008) dan budaya (Haniffa dan Cooke, 2002). Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel ini sehingga

memperkaya pemahaman mengenai transparansi informasi. Disamping itu faktor industri juga dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat membedakan antara sektor industri yang transparan dan kurang transparan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chowdhury, A dan Mavrotas, G. 1987. FDI and Growth: What Causes What? *The World Economy* 29 (1), pp 9-19.
- Fitriany, 2001. Signifikansi Perbedaan Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Wajib dan Sukarela Pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi IV*.
- Francis, J.R., Khurana, I dan Pereira, R. 2003. The Role of Accounting and Auditing in Corporate Governance and the Development of Financial Markets Around the World. *Asia Pacific Journal of Accounting and Economics*, Vol. 10, pp.1-31.
- Gunawan, Y. 2000. Analisis Pengungkapan Informasi Laporan Tahunan Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*.
- Hadi, Nor dan Sabeni, Arifin, 2002. Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Go Public di BEJ. *Jurnal Maksi*, Vol. 1.
- Haniffa, R.M. dan Cooke, T.E. 2002. Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporation, *Abacus* 38 (3), pp. 317-349.
- Healy, Paul M dan Palepu, C.G. , 1993. The Effect of Firms Financial Strategies on Stock Prices, *Accounting Horizons*, 7 (1) : 1-11.
- Hossain, M, Tan, M.L. dan Adam, M.B. 1994. Voluntary Disclosure in an Emerging Capital Market: Some Empirical Evidence from Company Listed on the KLSE. *The International Journal of Accounting* 29 (4): 31-57.
- Huafang, Xiao dan Jianguo, Yuan. 2007. Ownership Structure, Board Composition and Corporate Voluntary Disclosure Evidence From Listed Companies In China, *Managerial Accounting Journal*, 47, pp. 604-620
- Jensen, Michael C. dan Meckling, W.H. 1976, Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics* 3, pp.305-360.
- Lang, M.H. dan Lundholm, R.J. 1993. Cross Sectional Determinant of Analyst Rating of Corporate Disclosure. *Journal of Accounting Research*, 31, 246-271.
- Machmud, Novita. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) Pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat

**Pengaruh Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan  
Terhadap Transparansi Informasi (Ria Nelly Sari, Rita Anugerah & Rhia Dwiningsih)**

- Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006. *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak : Universitas Tanjung Pura
- Marwata, 2006. Hubungan antara Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, XII (1), pp. 59-66.
- McKinsey and Company, 2001. Giving New Life to the Corporate Governance reform Agenda for Emerging Markets, available at [www.Mckinsey.com/client-service/organisation-leadership/service/corporate-governance/pdf/EmergingMarketsOpinion.pdf](http://www.Mckinsey.com/client-service/organisation-leadership/service/corporate-governance/pdf/EmergingMarketsOpinion.pdf).
- Merton, R.C. 1987. A Simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information. *Journal of Finance*, 42, pp.483-510.
- Mohamad, N. 2002. *Corporate Governance in Malaysia*, PhD Disertation, University of Birmingham, Birmingham.
- Nugrahadi, Hestiono. 2008, Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Sukarela, *Tesis MM-UGM*.
- Prasetyantoko, A. 2008. *Corporate Governance: Pendekatan Institusional*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Salleh, F. Dan Dunmore, P.V. 2008. Political Influence, Corporate Governance and Financial Reporting Quality: Evidence from Companies in Malaysia. *Proceeding Global Accounting and Organizational Conference*.
- Sembiring, Eddy Rismanda. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*.
- Sloan, R. 2001. Financial Accounting and Corporate Governance: A Discussion. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 32, pp. 335-347.
- Winarno, W.W. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.